

ANALISIS DETERMINAN KESEJAHTERAAN ANAK DI INDONESIA

Rilla Mariska, Dewi Zaini Putri

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Rmariska47@gmail.com, putridewizaini@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out determine of child welfare in Indonesia by using Composite Children Welfare Index. The data used are secondary data in the form of cross section in 2015, with documentation data collection techniques and library studies obtained from relevant institutions and agencies. The variables used are Child Welfare, Income per capita, Income Distribution, Female Literacy Rate, Government Expenditure in education and health sector. The research methods used are: (1) Ordinary Least Square (OLS) Analysis, (2) Classical Assumption Test. The results of the study show that (1) Income per capita is positive and not significant on the child welfare in Indonesia. (2) Income distribustion is positive and significant on the child welfare in Indonesia. (3) Female Literacy Rate is positive and significant on the child welfare in Indonesia. (4) Government expenditure in education sector is negative and not significant on the child welfare in Indonesia(5) Government expenditure in health sector is negative and not significant on the child welfare in Indonesia(5) Income per capita, distribution income, female literacy rate, and government expenditure in eduacation and health statistically significant on the child welfare. So, only income distribution and female rate literacy is significant on the child welfare.*

Keywords: *Child Welfare, Imcome, Female Literacy Rate, Government Expenditure and Ordianry Least Square (OLS).*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kesejahteraan anak di Indonesia menggunakan indeks komposit kesejahteraan anak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa cross section pada tahun 2015, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari lembaga dan instansi yang terkait. Variabel yang digunakan adalah Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), pendapatan per kapita, distribusi pendaptan, angka melek huruf serta pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan Metode Penelitian yang dipakai yaitu: (1) Analisis Regresi Berganda (OLS), (2) Uji Asumsi Klasik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Pendapatan per kapita berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak. (2) Distribusi pendapatan berpengaruh positif and signifikan terhadap kesejahteraan anak. (3) Angka melek huruf perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anak. (4) Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpenagruh negatif dantidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak . (5) Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan anak (6) Pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, angka melek huruf perempuan, dan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Jadi, hanya distribusi pendapatan dan angka melek huruf perempuan yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia.*

Kata Kunci : *Kesejahteraan anak, Pendapatan, Angka Melek Huruf Perempuan, Pengeluaran Pemerintah, dan Ordinary Least Square (OLS).*

Pembangunan ekonomi sangat tergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat guna mencapai pemeratan ekonomi dan sosial, pemberantasan

kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup. Untuk pembangunan ekonomi ini diperlukan modal manusia. Modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak. Dimana anak adalah cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia sebagai pembangunan nasional. Kesejahteraan anak dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh, kesehatan, perlindungan serta banyaknya waktu yang digunakan anak untuk bermain dan belajar.

Di Indonesia kesejahteraan anak cukup baik dengan indeks komposit kesejahteraannya sebesar 70,37. Namun, data ini tidak sesuai dengan data yang dieksplorasi KPAI bahwa kekerasan pada selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, naik pada tahun 2012 ada 3.512 kasus dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 4.311 kasus dan meningkat drastis sebesar 5.066 kasus kekerasan pada anak (Setyawan, 2015). Ini menandakan terjadinya pro dan kontra pada kesejahteraan anak di lingkungan masyarakat di Indonesia.

Menurut Undang-Undang RI No.4 Tahun (1979) bahwa kesejahteraan anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan maupun sosial. Kesejahteraan anak dipengaruhi oleh tiga kesejahteraan yaitu (1) kesejahteraan ekonomi (2) kesejahteraan sosial (3) kesejahteraan psikologis. Pada penelitian ini, kesejahteraan anak fokus pada kesejahteraan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi antara lain (1) pendapatan per kapita (2) distribusi pendapatan (3) angka melek huruf perempuan (4) pengeluaran pemerintah disektor pendidikan (5) pengeluaran pemerintah disektor kesehatan.

Kesejahteraan anak di Indonesia dapat diukur melalui Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA). Indeks komposit kesejahteraan ini diukur melalui lima bidang yaitu (1) kelangsungan hidup anak (2) perlindungan anak (3) tumbuh kembang (4) partisipasi (5) identifikasi. Kelangsungan hidup anak berada pada indeks 77,28. Yang termasuk dalam kelangsungan hidup ini adalah angka neonatal, angka kematian bayi dan kematian balita. Perlindungan anak tercakup didalamnya pemeriksaan kehamilan, imunisasi dasar, imunisasi lanjut, anak yang bekerja dan anak yang melakukan pernikahan dini. Indeks dari perlindungan ini adalah 75,53. Tumbuh kembang anak memiliki indeks sebesar 67,26. Tumbuh kembang ini meliputi pengukuran berat badan bayi, gizi baik, dan angka partisipasi sekolah. Selanjutnya, partisipasi anak dengan indeks 51,29. Partisipasi ini dilihat dari anak yang melakukan perjalanan wisata, kegiatan olahraga, kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan. Terakhir, identitas yang memiliki indeks 80,52. Identitas ini meliputi anak yang memiliki akta kelahiran dan kartu nikah orang tua.

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional. Pada tahun 2015, pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar Rp 1.296.723.780,-. Distribusi pendapatan adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima setiap individu atau rumah tangga. Distribusi pendapatan diukur melalui gini rasio. Nilai gini rasio berkisar 0-1. Semakin mendekati 1 berarti gini rasionya semakin tinggi

yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi dan sebaliknya. Dimana gini rasio Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 0,424. Ini menandakan distribusi pendapatan di Indonesia berada pada tingkatan menengah. Angka melek huruf perempuan adalah tingkat baca atau tulis yang dilakukan perempuan guna menambah pengetahuan dan keterampilan. Angka melek huruf perempuan di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 93,34. Ini menandakan angka melek huruf di Indonesia cukup tinggi. Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan adalah dana yang dikucurkan pemerintah dibidang pendidikan. Dana yang dikeluarkan pemerintah disektor pendidikan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.884.365.840.000,-. Sementara pengeluaran pemerintah disektor kesehatan adalah dana yang dikucurkan pemerintah khusus disektor kesehatan. Dana yang dikelontarkan disektor kesehatan adalah sebesar Rp 2.792.432.410,-

TINJAUAN LITERATUR

Kesejahteraan anak

Menurut Undang-Undang RI No 4 Tahun 1979 (1979), anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah yang memiliki potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dimana anak berhak mendapatkan perawatan, asuhan, bimbingan, pemeliharaan dan perlindungan. Usaha untuk kesejahteraan anak ini dilakukan oleh anak itu sendiri, masyarakat dan pemerintah.

Kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, pertama secara keseluruhan kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya sebagian besar masyarakat pada tingkat tertentu, dan kedua adalah terpenuhinya kebutuhan apda berbagai aspek kehidupan dasar seperti sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan keamanan pada tingkat tertentu (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016). Untuk kesejahteraan anak, anak dikatakan sejahtera apabila anak hanya memiliki tugas belajar dan bermain.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrin Dalirazar (2003) menyatakan bahwa kesejahteraan anak dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, angka melek huruf, sosial-ekonomi dan konflik perperangan. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesejahteraan anak.

Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional. Biasanya, pendapatan per kapita diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yaitu PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{pendapatan perkapita} = \frac{\text{pendapatan nasional}}{\text{jumlah penduduk}}$$

Pendapatan per kapita berdampak langsung terhadap kesehatan dan nutrisi anak. Dimana peningkatan pendapatan per kapita setiap tahunnya akan mensejahterakan anak ke arah yang lebih baik (Vivi Irzalinda, 2014). Pendapatan per kapita meningkat, maka semua kebutuhan anak akan terpenuhi sehingga kesejahteraan anak meningkat.

Distribusi pendapatan

Menurut Todaro dan Smith (2006) distribusi pendapatan adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima setiap individu atau rumah tangga. Distribusi pendapatan suatu negara atau provinsi dapat diukur dari gini rasio. Gini rasio ini berkisar dari 0 hingga 1. Dimana 1 adalah tingkat ketimpangan distribusi tertinggi, sementara 0 adalah pemerataan pendapatan yang sempurna.

Distribusi pendapatan merupakan faktor penting dalam kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006). Dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan anak. Artinya, semakin tinggi distribusi pendapatan pada suatu wilayah, maka kesejahteraan anak akan menurun pada wilayah tersebut (Dalirazar, 2002).

Angka Melek Huruf Perempuan

Menurut Nasrin Dalirazar (2003) angka melek huruf adalah indikator untuk mengukur pendidikan perempuan. Angka melek huruf perempuan ini akan berdampak pada pengetahuan dan skill bagaimana melindungi dan merawat anak. Angka melek huruf perempuan ini berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan anak. Misalkan pendidikan ibu yang tinggi maka ini akan menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan anak, dan meningkatkan status gizi anak.

Pengeluaran Pemerintah disektor Pendidikan

Menurut Mankiw (2007) bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah disektor pendidikan yaitu 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Winarti (2014) pendidikan merupakan bentuk investasi sumberdaya manusia yang akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan juga dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan vital sebagai input fungsi produksi secara agregat.

Pengeluaran Pemerintah disektor Kesehatan

Menurut Hubbard *et al*(2012), pengeluaran pemerintah termasuk kedalam kebijakan fiskal. Dimana kebijakan fiskal ini diatur oleh pemerintah pusat. Struktur dan mekanisme kebijakan fiskal diatur oleh pemerintah pusat ini bervariasi setiap negaranya. Pemerintah pusat membuat keputusan tentang belanja dan pajak, tetapi tidak membuat keputusan tentang kebijakan fiskal. Karena kebijakan fiskal bukanlah tujuan dari kebijakan makroekonomi.

Dengan adanya pengeluaran pemerintah disektor kesehatan menjadi kesehatan lebih baik. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan yang lebih baik juga, dan sebaliknya. Karena kesehatan adalah hal penting dalam kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Analisis Determinan Kesejahteraan Anak di Indonesia

Metode Analisis

Data yang digunakan dalam ini adalah *cross section* yaitu data satu tahun 2015 dengan 34 provinsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah: $CW = \alpha + \beta_1 IPC + \beta_2 ID + \beta_3 FLR + \beta_4 EDU + \beta_5 HEALTH + u$ (1)

Dimana CW melambangkan kesejahteraan anak; IPC melambangkan pendapatan per kapita; ID melambangkan distribusi pendapatan; FLR melambangkan angka melek huruf; EDU melambangkan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan; HEALTH melambangkan pengeluaran pemerintah disektor kesehatan; u adalah *error term*; dan $\alpha, \beta_{1,2,3,4,5}$ melambangkan koefisien regresi.

Defenisi Operasional

Tabel 1 Analisis Determinan Kesejahteraan Anak di Indonesia

Variabel	Definisi
Kesejahteraan anak	Kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi dan identitas anak yang diukur melalui indikator Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA). IKKA ini diukur dari 0-100. Data ini diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2015 dari 34 provinsi di Indonesia.
Pendapatan per kapita	Besarnya pendapatan rata-rata dari penduduk suatu negara, yang dilihat dari indikator PDRB per kapita dalam satuan Ribu Rupiah. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data pada tahun 2015 dari 34 provinsi di Indonesia.
Distribusi pendapatan	Ukuran yang digunakan untuk menghitung ketimpangan jumlah penghasilan yang diterima setiap individu atau rumah tangga, yang diukur melalui indikator gini rasio dengan indeks 0-1. Data didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015.
Angka melek huruf perempuan	Tingkat bacaan dan tulisan yang dilakukan perempuan guna menambah pengetahuan dan skill. Indikator yang digunakan adalah angka melek huruf perempuan dengan satuan persentase. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 dari 34 provinsi di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah pendidikan	disektor	Dana yang dikucurkan pemerintah khusus untuk pendidikan dengan satuan Ribu Rupiah. Data pengeluaran pemerintah diperoleh dari Kementerian Keuangan pada tahun 2015 dari 34 provinsi di Indonesia.
Pengeluaran pemerintah kesehatan	disektor	Dana yang dikucurkan pemerintah khusus untuk kesehatan dengan satuan Ribu Rupiah. Data pengeluaran pemerintah diperoleh dari Kementerian Keuangan pada tahun 2015 dari 34 provinsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi Persamaan Linear Berganda pada Kesejahteraan Anak

Untuk mengetahui pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen digunakan analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian determinan kesejahteraan anak dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi determinan kesejahteraan anak

Dependent Variable: CW
Method: Least Squares
Sample: 1 34
Included observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.32855	19.49332	1.145446	0.2617
IPC	3.50E-05	3.76E-05	0.931733	0.3594
ID	54.45723	24.14848	2.255099	0.0321
FLR	0.287663	0.161434	1.781923	0.0856
EDU	-1.08E-08	1.96E-08	-0.551097	0.5859
HEALTH	-1.17E-08	1.64E-08	-0.714408	0.4809
R-squared	0.373383	Mean dependent var		68.87147
Adjusted R-squared	0.261487	S.D. dependent var		6.457616
S.E. of regression	5.549465	Akaike info criterion		6.424065
Sum squared resid	862.3038	Schwarz criterion		6.693423
Log likelihood	-103.2091	Hannan-Quinn criter.		6.515924
F-statistic	3.336883	Durbin-Watson stat		1.319927
Prob(F-statistic)	0.017293			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Pada Tabel 2 diatas memperlihatkan hasil estimasi determinan kesejahteraan anak adalah sebagai berikut:

$$CW = 22.33 + 3.50*IPC + 54.46*ID + 0.29*FLR - 1.08*EDU - 1.17*HEALTH \quad (2)$$

Pendapatan per kapita (IPC) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan anak (CW). Dengan nilai koefisien pendapatan per kapita sebesar 3.0E-05. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan per kapita sebesar Rp 100.000, maka akan meningkatkan kesejahteraan anak sebesar 3,50 indeks. Distribusi pendapatan (ID) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan anak (CW). Ini memperlihatkan apabila distribusi pendapatan meningkat 1 %, maka akan meningkatkan kesejahteraan anak sebesar 54,45 indeks. Angka melek huruf

perempuan (FLR) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan anak (CW). Ini memperlihatkan apabila angka melek huruf naik 1%, maka kesejahteraan anak akan meningkat sebesar 0,28 indeks. Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan (EDU) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan anak (CW). Dengan nilai koefisien $-1.08E-08$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan sebesar Rp 100.000,- maka akan menurunkan kesejahteraan anak sebesar 1.08 indeks. Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan (HEALTH) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan anak (CW). Dengan nilai koefisien sebesar $-1.17E-08$. Hal ini memperlihatkan apabila terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah disektor kesehatan sebesar Rp 100.000,- maka akan menurunkan kesejahteraan anak sebesar 1.17 indeks.

Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh pendapatan per kapita tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Artinya, setiap terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita tidak akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak, namun kepada keluarga anak. Sebab tidak semua pendapatan per kapita dialokasikan ke anak langsung.

Secara logika, ini menyalahi teori bahwa dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita pada suatu negara, maka akan mempengaruhi kesejahteraan anak ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, dengan menurunnya pendapatan per kapita suatu negara, maka akan menurunkan kesejahteraan anak pula. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irzalinda (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan anak.

Penelitian lain yang tidak sesuai adalah Gong dan Di (2015) bahwa pendapatan sangat penting untuk mengakses pembangunan anak melalui pendidikan pada negara berkembang. Penelitian ini juga melihat perbedaan pendapatan berdasarkan wilayah antara pedesaan dan perkotaan. Dimana pada daerah pedesaan, pendapatannya masih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Sehingga pendidikan anak di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan di perkotaan.

Namun, penelitian ini sesuai dengan pendapat Dalirazar (2003) menyatakan pendapatan per kapita tidak signifikan terhadap kesejahteraan anak. Serupa dengan penelitian Syamsurijal (2018) bahwa pendapatan per kapita tidak memberikan pengaruh secara langsung kesejahteraan anak, namun memberikan pengaruh positif secara tidak langsung kepada kesejahteraan anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Younsi dan Chakroun (2018) menyatakan bahwa kematian dikaitkan dengan pendapatan yang tinggi. Penelitian ini mengestimasi desain dari dampak pendapatan terhadap risiko kematian terlepas dari faktor sosial. Efek ini tidak terbatas pada pendapatan karena angka kematian menurun secara terus menerus sepanjang distribusi pendapatan yang menyatakan untuk tidak mempertanyakan dampak sosial ekonomi terhadap kematian. Kesejahteraan disini dilihat dari angka kematian.

Penelitian lain yang sejalan adalah Gille (2014) bahwa pendapatan hanya berpengaruh signifikan pada negara yang kaya dan tidak signifikan pada negara berkembang terhadap kesejahteraan. Hal ini dikarenakan negara yang kaya lebih mengutamakan kreativitas dan perkembangan anak. Sementara di negara berkembang, anak masih belum mendapatkan perhatian yang penuh dari berbagai pihak.

Pada penelitian kali ini dalam kesejahteraan anak yang dilihat dari indeks kompositnya, pendapatan per kapita bukan menjadi alasan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Karena pendapatan per kapita tidak berhubungan langsung terhadap kesejahteraan anak. Namun berpengaruh pada kesejahteraan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sama halnya yang disampaikan oleh Dengah *et al* (2014) dalam penelitiannya bahwa peningkatan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan rumah. Secara tidak langsung maka ini akan meningkatkan kesejahteraan anak. Makanya, peningkatan pendapatan per kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita tidak mempengaruhi kesejahteraan anak di Indonesia. Walaupun pendapatan per kapita memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Jadi, seberapa tingginya pendapatan per kapita tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Disebabkan atas dasar faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Pengaruh Distribusi Pendapatan terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia

Dari hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Artinya setiap terjadinya peningkatan distribusi pendapatan sebesar 1% pada distribusi pendapatan akan berpengaruh untuk peningkatan kesejahteraan anak sebesar 54,45%. Hal ini menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia berpengaruh kepada kesejahteraan anak.

Penelitian ini sejalan dengan Todaro dan Smith (2006) Apabila terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi pada suatu negara maka akan ada dorongan untuk bekerja keras dan melakukan inovasi. Distribusi pendapatan yang tinggi pada suatu wilayah akan mendorong anak untuk melakukan inovasi dan belajar. Dengan adanya inovasi dan belajar, maka kesejahteraan anak akan meningkat.

Hasil serupa juga dilakukan oleh Shaikh (2017) dalam penelitiannya bahwa gini ratio berpengaruh positif terhadap pendapatan personal dan distribusi pendapatan adalah komposisi terbesar untuk mensubstitusi penyebaran pendapatan pada wilayah yang berpendapatan tinggi. Dengan adanya distribusi pendapatan yang berbeda-beda setiap daerah, maka masyarakat yang termasuk anak-anak didalamnya akan berusaha untuk memperbaiki agar distribusi pendapatan merata di Indonesia. Langkah yang diambil untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan ini adalah melalui inovasi dan belajar untuk mengetahui hal-hal baru sehingga tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak akan sama setiap daerahnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dalirazar (2003) yang menyatakan bahwa di Amerika Latin, distribusi pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan anak. Pada penelitian ini, distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan anak. Maksudnya semakin tinggi distribusi pendapatan, maka akan menurunkan kesejahteraan anak. Sebaliknya, semakin rendah distribusi pendapatan, maka akan meningkatkan kesejahteraan anak.

Suatu negara tidak harus mencapai pemerataan pendapatan yang sempurna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Melainkan tugas negara adalah mengendalikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakatnya hingga tingkat serendahnyapun mungkin namun bukan 0. Negara bisa mengendalikan tingkat ketimpangan pendapatannya melalui pengendalian faktor-faktor yang menjadi penyebab tingkat ketimpangan pendapatan.

Pajak dan sistem jaminan sosial adalah kekuatan untuk mengurangi distribusi yang tinggi. Ketika ketimpangan pendapatan pasar meningkat, karena pengangguran yang tinggi dan peningkatan upah yang tinggi. Namun, ada langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yaitu dengan tingkat pendapatan yang merata, meningkatkan ketenagakerjaan di daerah-daerah yang masih dikategorikan tertinggal dan mempertahankan instansi yang berupaya memberikan upah yang adil dan kondisi ketenagakerjaan dimasa depan yang lebih baik lagi (Whiteford, 2018).

Jadi, dapat disimpulkan tingginya distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio di setiap wilayah di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan anak dalam berinovasi dan bekerja keras dalam belajar.

Pengaruh Angka Melek Huruf Perempuan terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa angka melek huruf perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Artinya semakin meningkatnya angka melek huruf perempuan, maka kesejahteraan anak Indonesia juga akan mengalami peningkatan. Ini disebabkan masyarakat mengetahui betapa pentingnya melek huruf terutama di zaman yang serba canggih ini.

Perempuan adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Jika keterampilan membaca ibu atau perempuan tinggi, maka semua yang diberikan kepada anak akan berdampak baik, karena tingginya tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Perempuan dapat mengakses informasi seputar tumbuh kembang anak mulai dari dalam kandungan hingga anak beranjak dewasa.

Hal ini sesuai dengan penelitian Nasrin Dalirazar (2003) yang menerangkan bahwa angka melek huruf perempuan adalah faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan anak, angka melek huruf perempuan ini berdampak pada kehidupan keluarga dan secara tidak langsung berdampak kepada masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latif (2009) di Pakistan bahwasanya pendidikan perempuan yang diukur dari angka melek hurufnya merupakan faktor utama yang dijadikan pendidikan dasar untuk anaknya. Artinya,

tanpa orang tua yang berpendidikan maka anak akan sedikit menerima pendidikan dasar. Dengan meningkatnya angka melek huruf perempuan di Pakistan khususnya di daerah pedesaan, maka hal ini akan mendesak pemerintah untuk membuat pembelajaran yang lebih baik untuk anak. Sehingga kesejahteraan menjadi meningkat.

Penelitian ini bertolak belakang dilakukan oleh Rehman *et al* (2015) bahwa angka melek huruf adalah indikator utama dalam pembangunan ekonomi pada negara, dimana tanpa melek huruf maka akan menurunkan pertumbuhan sosial ekonomi. Dewasa ini, banyak negara yang berusaha untuk mencapai angka melek hurufnya 100 persen. Dengan demikian, negara tersebut mampu bersaing pada ekonomi global. Penelitian ini dilakukan di Pakistan dengan hasil pengaruh angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekonomi di Pakistan. Ini dikarenakan banyaknya masalah ekonomi dan non-ekonomi, diantaranya adalah peningkatan populasi dan kemiskinan.

Di dunia untuk meningkatkan angka melek huruf, diadakan perayaan angka melek huruf dengan nama “*International Literacy Rate*” setiap tanggal 8 September. Pada perayaan ini dilakukan pembangunan perpustakaan mini, pemberian pelayanan kit untuk kelas gabungan. Ini adalah salah satu kebijakan dunia untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui bacaan dan tulisan. Karena pada dasarnya, kemampuan angka melek huruf tidak hanya pengembangan diri dan pembelajaran, tetapi juga ekonomi. Sebaiknya, hal ini juga dilakukan di Indonesia, walaupun hasilnya tidak terlalu berdampak. Namun, dengan adanya perayaan tersebut, muncul pemikiran masyarakat terutama perempuan untuk menyadari pentingnya memiliki pengetahuan ankan tulis dan baca.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa angka melek huruf perempuan akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anak yang artinya setiap tingginya angka melek huruf perempuan akan meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Bahwa artinya setiap terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan tidak berpengaruh pada kesejahteraan anak. Ini dikarenakan pendidikan merupakan investasi dalam jangka panjang, dimana hasil pendidikan itu dapat dirasakan beberapa tahun setelah menyelesaikan pendidikan.

Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia dikarenakan pendidikan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Pendidikan akan berdampak setelah beberapa tahun menduduki bangku pendidikan. Pendidikan ini bersifat investasi di masa yang akan datang. Alasan lain adalah alokasi dana pendidikan tidak dapat dirasakan langsung oleh anak. Berikut penggunaan alokasi dana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (Informasi APBN, 2018): (1) Program Indonesia Pintar dengan target 19,6 juta jiwa. (2) Bantuan Operasional Sekolah dengan sasaran sebesar 56 juta jiwa. (3) Bantuan Bidikmisi dengan

sasaran 401,5 ribu mahasiswa.(4) Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas 61,2 ribu sekolah. (5) Tunjangan Profesi Guru, dengan bagian: (a) Non-PNS : 435,9 ribu guru, (b) PNS: 257,2 ribu guru, (c) PNS Daerah : 1,2 juta guru. Masih globalnya data pengeluaran pemerintah disektor pendidikan tanpa alokasi yang dikhususkan untuk anak usia 0-18 tahun juga penyebab ketidaksignifikan pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan terhadap kesejahteraan anak

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Hararap (2011) bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan melalui IPM, dimana pengeluaran pemerintah disektor pendidikan termasuk kedalam Dana Anggaaran Khusus (DAK), dan kesejahteraan anak termasuk IPM. DAK ini berbeda-beda tergantung dari prioritas pembangunan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hal ini bertolak belakang yang disampaikan oleh Dalirazar (2003) bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan anak. Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan bertentangan dengan kesejahteraan pelaksanaan pendidikan.

Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diakibatkan oleh beberapa faktor. Investasi bidang pendidikan memiliki dampak jangka panjang sehingga membutuhkan waktu terhadap peningkatan kualitas anak sehingga kesejahteraan anak belum terasa. Penyebab lainnya adalah orientasi pengeluaran pemerintah tersebut lebih mengarah kepada belanja yang bersifat konsumtif bukan investasi seperti belanja pegawai dan belanja operasional. Akibatnya program-program pendidikan yang sudah direncanakan tidak berhasil karena adanya ketidak efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan implementasi anggaran sektor pendidikan.

Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu sistem pendidikan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan penganggaran APBN untuk sektor pendidikan minimal 20% dari total belanja dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah berjalan cepat. Gaji pendidik juga telah ditambah, semua hal tersebut seharusnya mampu mendorong tingginya produktivitas anak dan kesejahteraannya.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah juga lebih beratkan keada biaya untuk kebijakan pemerintah dalam mendukung agar terwujudnya berbagai macam program agenda prioritas nasional (Nawacita). Program tersebut antara lain pembangunan maritim, peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan industri pertahanan dan keamanan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas serta meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Sebaiknya, pada sektor pendidikan juga diperhitungkan adanya penambahan kebijakan disektor pendidikan seperti halnya cakupan peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun). Sehingga dengan adanya berbagai program tersebut

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan anak disebabkan atas dasar faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengeluaran pemerintah di Sektor Kesehatan terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor kesehatan bernilai negatif terhadap kesejahteraan anak. Namun secara statistik tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Artinya, setiap terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak mempengaruhi kesejahteraan anak. Kesehatan ini hampir sama dengan pendidikan, yaitu bersifat investasi dalam jangka panjang.

Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan ini bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan anak. Dikarenakan alokasi pengeluaran pemerintah disektor kesehatan belum digunakan secara baik serta adanya ketidakcukupan alokasi anggaran yang disebabkan oleh adanya politik anggaran sesuai penelitian Maehaeni dan Herawati (2018). Dimana penelitian ini menyatakan politik anggaran di DPR terjadi pada saat penetapan pagu definitif, Kemenkeu terlihat kurang memberikan dukungan pada sektor kesehatan, dimana anggaran kesehatan baru mencapai 2,5% dan dasar pembagian anggaran untuk unit dan subunit kurang jelas. Berikut alokasi pengeluaran pemerintah di kesehatan (Informasi APBN, 2018): (1) Program Indonesia Sehat dengan target 92,4 juta jiwa. (2) Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR dengan sasaran sebanyak 1,8 juta orang. (3) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas sebanyak 49 Rumah Sakit atau Balai Kesehatan. (4) Imunisasi untuk anak usia 1-11 bulan dengan target 92%. (5) Sertifikasi obat dan makanan dengan target 74,0 ribu. Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan khusus untuk anak usia 0-18 tahun juga salah satu penyebab tidak signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Hararap (2011) bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan melalui IPM, dimana pengeluaran pemerintah disektor kesehatan termasuk kedalam Dana Anggaaran Khusus (DAK), dan kesejahteraan anak termasuk IPM. DAK ini berbeda-beda tergantung dari prioritas pembangunan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Dalirazar (2003) bahwa pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berdampak positif terhadap kesejahteraan anak. Kebijakan fiskal seperti halnya pengeluaran pemerintah disektor kesehatan dapat meningkatkan modal manusia dan pembangunan ekonomi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Meningkatnya kesejahteraan anak disebabkan atas dasar faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara bersama-sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, angka melek huruf perempuan, pengeluaran pemerintah di sektor

pendidikan dan kesehatan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Pengaruh secara bersama-sama ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini terhadap kesejahteraan anak di Indonesia sebesar 0,3733 atau 37% dan 62,67% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, meningkatnya atau menurunnya kesejahteraan anak di Indonesia ditentukan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, angka melek huruf perempuan, pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pendapatan per kapita berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak. (2) Distribusi pendapatan berpengaruh positif and signifikan terhadap kesejahteraan anak. (3) Angka melek huruf perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anak. (4) Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak. (5) Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan anak (6) Pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, angka melek huruf perempuan, dan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Jadi, hanya distribusi pendapatan dan angka melek huruf perempuan yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anak di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. 2017. *PDRB per kapita tahun 2010-2016*. <http://www.bps.go.id>. Jakarta diakses tanggal 22 Desember 2018
- _____. 2018. *Gini Rasio Indonesia tahun 2002-2018*. <http://www.bps.go.id>. Jakarta diakses tanggal 22 Desember 2018
- _____. *Angka Melek Huruf Indonesia tahun 2009-2017*. <http://www.bps.go.id>. Jakarta diakses tanggal 22 Desember 2018
- Dalirazar, Nasrin (2002). An International Index of Child Welfare. *Working Paper Series*, 1-12
- Dalirazar, Nasrin (2003). An Econometric Analysis of International Variations in Child Welfare. *Working Paper Series*, 1-29
- Dengah, Stefandy dan Niode, Vecky (2014). Analisis Pengaruh Pendaptan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 71-81
- Gille, Veronique. (2014). Distribution of Human Capital and Income: An Empirical Study on Indian States. *Journal of Macroeconomics*, 1-34
- Gong, Xin dan Di, Xu. (2015). Household Incoe and Preschool Attendance in China. *Child Development*, 194-2018
- Gujarati, Damodar. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga
- Harahap, Riva. U. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, 47-58

- Hubbard, R, O'Brien, A.P dan Rafferty, M (2012). *Macroeconomics*. United State of America: Pearson Education, Inc
- Irzalinda, Vivi. (2014). Perlindungan Anak dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Anak pada Keluarga Petani. *Repository IPB*, 1-123
- KPPA (2016). *IKKA*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Latif, Amna. (2009). A critical Analysis of School Enrollment and Literacy Rates of Girl and Woman in Pakistan. *Educational Studies*, 424-439
- Mankiw, G. N. (2007). *Makroekonomi edisi keenam*. Jakarta: Erlangga
- Marhaeni, Dewi dan Herawati, Diah. (2018). Politij Anggaran di Sektor Kesehatan. Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Unpad
- Rehman, A. Jingdong, L., dan Hussain, I. (2015). The Province-Wise Literacy Rate in Pakistan and its Impact on Economy. *Pacific Science ReviewB; Humanities and Social Sciences 1*, 140-144
- Setyawan, Davit (2015). *KPAI: Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. Diakses tanggal 17 Desember 2018 dari KPAI: <http://www.kapi.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>
- Shaikh, Anwar. (2017). Income Distributrion, Econophysics and Piketty. *Review of Political Economy*, 18-29
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group
- Todaro, Michael. P dan Smith, Sam. C (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979
- Whiteford, Peter. (2018). Trends in Australia's Distribution of Income and Wealth. *Ecodate*, 1-10
- Winarti. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Ruang Lingkup Ekonomika*. Jakarta: Degdikbud Universitas Terbuka
- Younsi, Moheddine dan Chakroun, Mohamed. (2018). The Conditional Effect of Income Distribution on Mortality Risk of Men in Tunsia: Poverty Effect or Wealth Effect?. *The Social Science Journal*, 1-11